

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pengelolaan keuangan daerah dinilai masih kurang (kompas.id, 2019). Pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih kurang ialah pengelolaan APBD. APBD sebagai salah satu sumber keuangan suatu daerah yang harus dikelola dengan baik, agar daerah tersebut dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dalam mengelola APBD. Sehingga masyarakat yang tinggal daerah tersebut dapat hidup sejahtera.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, dari hasil evaluasinya tersebut masih banyak daerah yang memiliki rapor merah dalam pengelolaan anggaran (sindonews.com, 2017). Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih juga menilai bahwa pengelolaan keuangan daerah masih buruk, menurut dia pengelolaan keuangan daerah selama ini bukannya membaik tapi malah memburuk (sindonews.com, 2017). Dari data Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), molornya APBD tercatat ada di 20 kabupaten/kota dan 2 provinsi. Kasus molornya APBD ini sangat disayangkan karena jumlahnya cukup banyak dan rutin terjadi tiap tahun (sindonews.com, 2018). Pada tahun 2019 Sri Mulyani menerima laporan adanya nama–nama desa baru yang tidak memiliki penduduk, kehadiran desa palsu itu

ternyata hanya untuk mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat (sindonews.com, 2019).

Berdasarkan isu di atas, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordawati, 2010). Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.

Aksesibilitas (*accessibility*) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Menurut Lewier dan Kurniawan (2016) bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nurlaili (2016) penyajian laporan keuangan daerah, dan

aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sande (2013), bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002.p.162) bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah.

Hasil penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya GAP dari hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Sastra (2013), bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Nurlaili (2016), bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Kurniawan dan Rahayu (2019), bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan penelitian (GAP) yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palopo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palopo ?
2. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palopo ?
3. Bagaimana pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palopo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat kepada:

1. Bagi BPKAD Kota Palopo sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya dan menilai kinerja keuangan secara lebih baik.
2. Bagi masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah Kota Palopo.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah mencakup pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini hanya dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga peneliti tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2), Sementara variabel terikatnya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah (Y).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Agency Theory*

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling 1976 dalam Hehanussa 2015). Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan *stakeholder*, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap *stakeholder* lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang teori keagenan diatas, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat adalah *principal* dan pemerintah daerah adalah *agent*. Principa memberikan wewenang pengaturan kepada *agent* dan memberikan sumber daya kepada *agent* (dalam bentuk pajak dan lain sebagainya). Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Jadi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan

pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

2.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2004.p.37) penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya.

Laporan keuangan sektor publik merupakan hasil dari transaksi yang telah dilakukan pemerintah yang terstruktur dalam posisi keuangan (Hehanussa, 2015). Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan, jujur, dan terbuka kepada masyarakat (Sumiyati, 2015). Laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik kepada masyarakat.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
2. Manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Fauziyah (2017) mengemukakan empat karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
 - c. Tepat waktu.
 - d. Lengkap.
2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :
- a. Penyajian jujur.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).
 - c. Netralitas.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2.3 Jenis – Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah daerah secara tersanding.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi suatu keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat / daerah selama periode tertentu.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Adapun unsur yang di cakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2.4 Indikator Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Sande (2013) indikator variabel penyajian laporan keuangan daerah :

1. Laporan keuangan disusun secara lengkap.
2. Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu.
3. Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur.
4. Laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh.
5. Informasi yang dimuatkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
6. Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak ukur untuk tahun berikutnya.

2.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.3.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Menurut Hehanussa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk

memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder.

Mardiasmo (2002.p.174) menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, terdapat penjelasan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat.

Fauziah (2017) menyatakan bahwa, agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan memenuhi hal berikut :

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

2.3.2 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Sumiyati (2015) dalam aksesibilitas terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan, dan *accessible*.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2010.p.20) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Bastian (2010.p.385) akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Sande, 2013).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Fauziyah, 2017).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah kepada publik untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi.

2.4.2 Jenis - Jenis Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2010.p.20) menyebutkan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountabiliy*) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

2.4.3 Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo (2010.p.20) menjelaskan dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik antara lain :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran merupakan akuntabilitas yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum merupakan akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.4.4 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Wahida (2015) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan terdiri dari :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
2. Akuntabilitas Proses (*process accountibability*)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sastra (2013) menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sande (2013) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wahyuni, *et. al.* (2014) hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

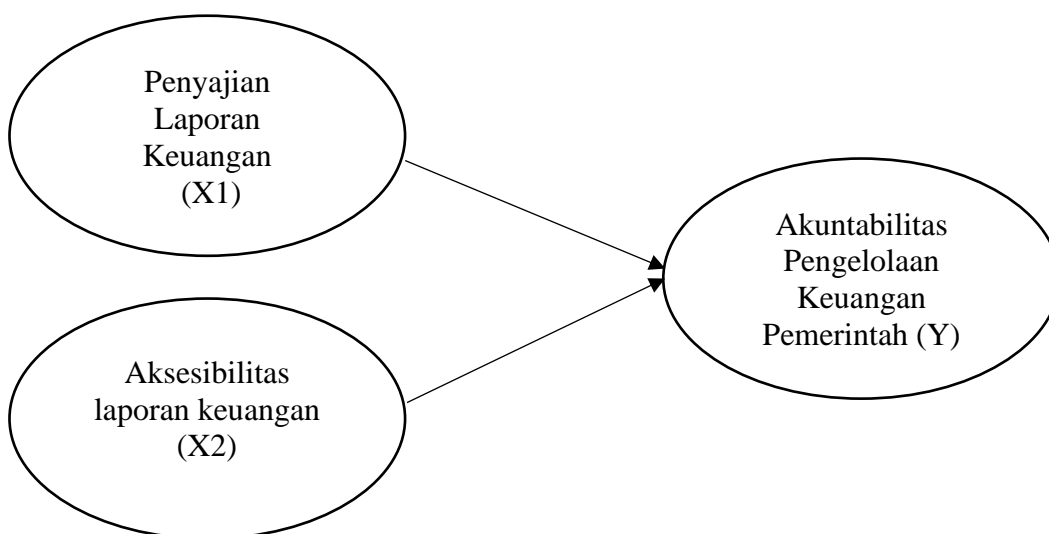
Hasil penelitian Hehanussa (2015) pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Aprianti dan Nursiam (2015) bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Saragih (2015) bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Lewier dan Kurniawan (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Nurlaili (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Putri (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian, aksesibilitas dan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kurniawan dan Rahayu (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada sekretariat daerah Kota Mataram.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Diduga bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

H2 : Diduga bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

H3 : Diduga bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer, yang diperoleh melalui alat pengumpul data berupa kuisisioner yang diedarkan secara langsung. Kuisisioner ini berisi berbagai pertanyaan dan pernyataan yang berkaitan dengan variabel - variabel yang akan diteliti dengan teknik penarikan sampel menggunakan metode *simple random sampling*.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Metode *simple random sampling* adalah suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi yang memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi ada wanita dan pria, atau ada yang kaya atau yang miskin, ada manajer atau bukan manajer dan perbedaan-perbedaan lainnya. selama perbedaan gender, status kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-perbedaan lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka penelitian dapat mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan demikian setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.

Menurut Margono (2004.p.126) *simple random sampling* adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpengcil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Menurut Kerlinger (2006.p.188) *simple random sampling* adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1).

3.3 Populasi

Sugiyono (2010.p.117) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD Kota Palopo yang berjumlah 114 orang.

3.4 Sampel

Sugiyono (2010.p.118) menjelaskan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Adapun kriteria yang

digunakan dalam pemelihan sampel yaitu pegawai BPKAD Kota Palopo yang berstatus ASN sebanyak 49 orang dan honorer sebanyak 20 orang. Jadi total sampel yang digunakan adalah 69 orang.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

1.5.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2011.p.52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) $> r$ tabel. Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf probabilitas kesalahan ($\text{sig} \leq 0,05$ dan r hitung $> r$ tabel, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila taraf probabilitas kesalahan ($\text{sig} \geq 0,05$ dan r hitung $< r$ tabel).

1.5.2 Uji Realibilitas

Ghozali (2011.p.47) menjelaskan uji Realibilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika nilai Alpha (α) $\geq 0,7$. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan sebuah regresi yang mana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksikan variabel tergantung dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas (Suliyanto, 2011.p.37). Sehingga persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien regresi

x_1 : Penyajian Laporan Keuangan

x_2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan

e : Error

2. Uji F

Ghozali (2011.p.101) menjelaskan, uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen. Pengujian ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah tepat. Kriteria dalam menguji statistik F sebagai berikut, bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan (0,05), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$

tabel atau probabilitas $>$ nilai signifikan (0,05), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji t

Ghozali (2011.p.101) menjelaskan bahwa uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara parsial (individual) dalam menerangkan variabel dependen. Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu menerangkan pengaruh terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan yaitu dengan nilai signifikansi 0,05 dan membandingkan t hitung dengan t tabel yang ditentukan sebagai berikut, Apabila tingkat signifikansi $< \alpha$ (0,05) dan t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila apabila tingkat signifikansi $> \alpha$ (0,05) dan t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2011.p.97) koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R² semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Apabila nilai R²

mendekati satu, maka variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat - syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, outokorelasi heteroskedastisitas, dan linieritas (Suliyanto,2011.p.69). Uji asumsi klasik meliputi :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya (Suliyanto, 2011.p.69).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak maka regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier (Suliyanto, 2011.p.70). Multikolinieritas akan membuat variabel-variabel independen tidak sama dengan nol. Mendeteksi adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai

tolerance dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari sama dengan 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2011.p.105).

3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2011.p.139) menyebutkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah pada model regresi terjadi perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke yang lainnya. uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white adalah cara untuk uji Heteroskedastisitas. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.8 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini hanya melibatkan dua variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, sedangkan variabel dependennya yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Adapun definisi operasional masing-masing variabel yaitu:

1. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan pada kantor BPKAD Kota Palopo harus sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian

laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan BPKAD Kota Palopo.

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* pada kantor BPKAD Kota Palopo dan juga memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui dan/atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder* dan masyarakat.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Pihak BPKAD Kota Palopo harus akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dimana proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2 Gambaran Umum Kantor BPKAD Kota Palopo

Kantor BPKAD Kota Palopo merupakan salah satu kantor pemerintahan yang terletak di Kota Palopo, tepatnya di Jl. Jendral Sudirman. Kantor ini dikepalai oleh Bapak H. Muhammad Samil Ilyas, S.E., M.M. Kantor BPKAD memiliki fungsi yaitu meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

1. Sejarah Singkat Kantor BPKAD Kota Palopo

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

2. Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Palopo

Secara umum kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan berdasarkan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan:

- a) Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- b) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
- c) Penyelenggaraan kegiatan teknik operasioanal dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d) Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- f) Pelakasaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Sekaligus Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

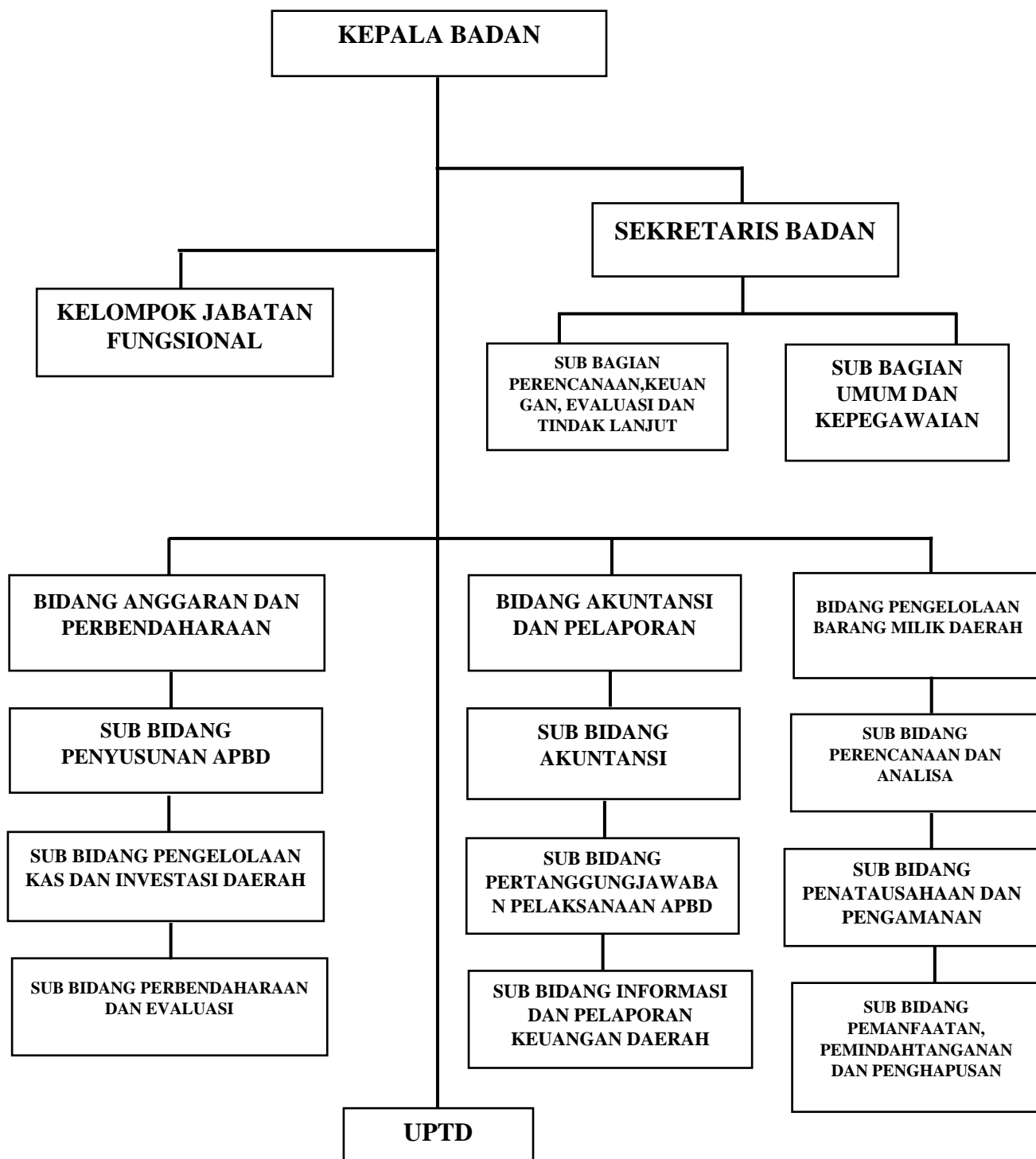
a) Visi

” Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga, Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya, Dan Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia”.

b) Misi

- 1) Meningkatkan kualitas profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- 3) Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

4. Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.3 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kota Palopo. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada Kantor BPKAD sebanyak 69 eksamplar dan diberikan pada pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 69 eksamplar, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 100%. Adapun rincian dapat dilihat

Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase %
1.	Distribusi Kuesioner	69	100%
2.	Kuesioner Kembali	69	100%
3.	Kuesioner Cacat/Tidak Kembali	0	0%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	69	100%

4.4 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas merupakan pengujian untuk yang dilakukan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuisioner, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji kuisioner penelitian yang digunakan memberikan data yang reliabel, data dikatakan reliable apabila mendapatkan hasil yang sama pada setiap pengujian.

1. Uji Validitas Data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan

menggunakan metode *produc moment person correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *corrected Item-Total Correlation* $>$ r_{tabel} pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	X1.1	0,742	0,235	Valid
	X1.2	0,739	0,235	Valid
	X1.3	0,546	0,235	Valid
	X1.4	0,539	0,235	Valid
	X1.5	0,666	0,235	Valid
	X1.6	0,540	0,235	Valid
	X1.7	0,618	0,235	Valid
	X1.8	0,574	0,235	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	X2.1	0,677	0,235	Valid
	X2.2	0,550	0,235	Valid
	X2.3	0,646	0,235	Valid
	X2.4	0,718	0,235	Valid
	X2.5	0,677	0,235	Valid
	X2.6	0,740	0,235	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah	Y.1	0,316	0,235	Valid
	Y.2	0,305	0,235	Valid
	Y.3	0,369	0,235	Valid
	Y.4	0,497	0,235	Valid
	Y.5	0,663	0,235	Valid
	Y.6	0,690	0,235	Valid
	Y.7	0,670	0,235	Valid
	Y.8	0,618	0,235	Valid
	Y.9	0,542	0,235	Valid
	Y.10	0,571	0,235	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada signifikan 0,05 (5%).

2. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator variabel. Jika jawaban responden tetap stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan. Dikatakan reliabel jika nilai Alpha (α) $\geq 0,7$.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,708	0,70	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,774	0,70	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,755	0,70	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena nilai *Alpha* dari variabel total lebih besar dari 0,70, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur alat angket dalam penelitian ini.

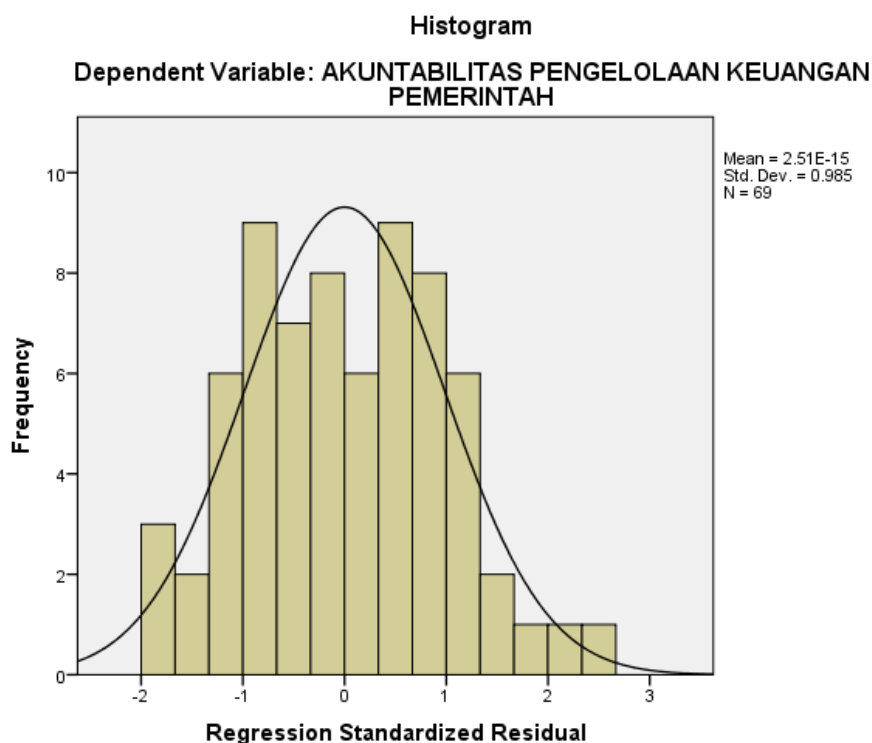
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini ada tiga, yaitu uji normalitas, multikolonieritas dan heteroskedastisitas. Ketiga uji ini digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal, tidak terdapat gejala multikolonieritas dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil dari ketiga uji tersebut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini untuk menguji apakah variabel pengganggu atau

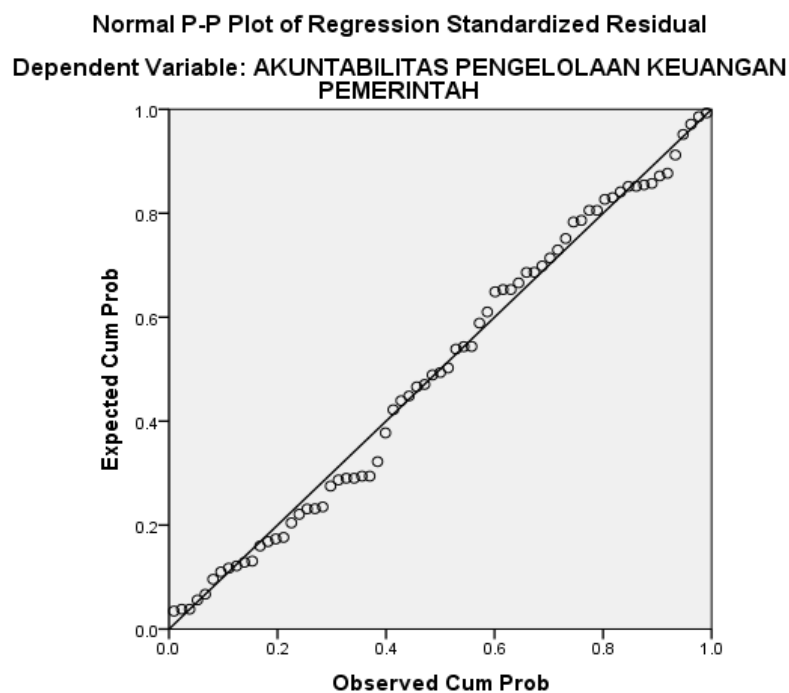
variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual harus normal karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.



Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit. Selain dari

grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini:



Gambar 4.3 Grafik Plot Uji Normalitas

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi

korelasi diantara variabel independennya. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji multikolonieritas dalam penelitian ini :

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	.998	1.002
	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	.998	1.002

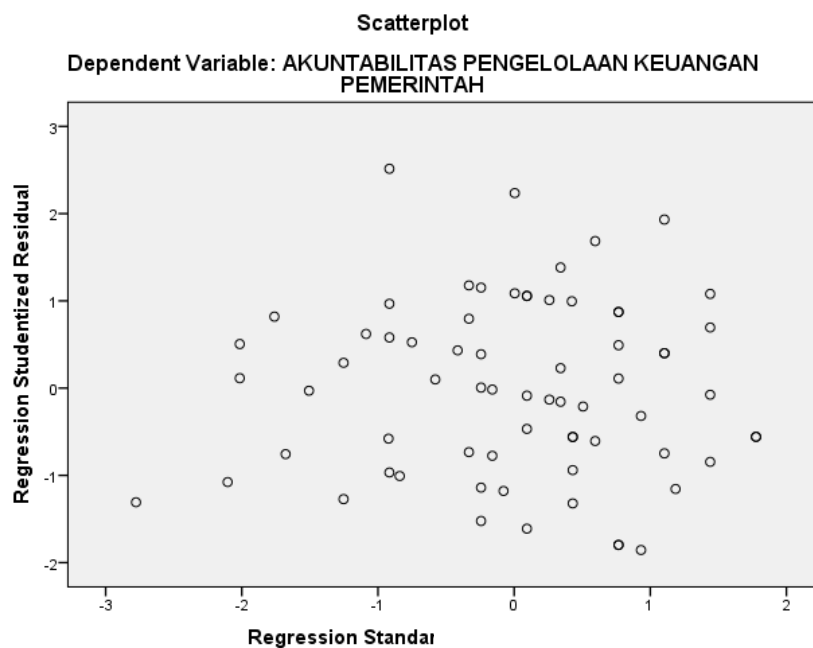
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah $> 0,100$. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel Penyajian Laporan Keuangan sebesar 0,998 dan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 0,998. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus $> 0,100$.

Sedangkan untuk Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan, nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah 1.002. Oleh karena itu, nilai ini juga memenuhi persyaratan lain dari uji poliklonal ini, yaitu nilai VIF harus kurang dari 10.000. Karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Berikut hasil pelaksanaan uji heteroskedastisitas :



Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik

di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah menggunakan variabel independennya adalah Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan.

4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah (Y). Hal itu dapat dilihat pada persamaan regresi linier sebagai berikut :

Tabel 4.5 Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.744	6.807		4.369	.455
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	.242	.122	.236	1.984	.002
	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	.183	.195	.111	.938	.001

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

$$Y = 29.744,a + 0.242,X1+ 0.183,X2$$

Apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah dengan sendirinya sebesar nilai konstanta yaitu 29.744, apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah sebesar 0,242 setiap satu satuan X1, dan apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah sebesar 0,183 setiap satu satuan X2. Dengan pengambilan keputusan dalam uji regresi linier berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikan variabel Penyajian Laporan Keuangan sebesar $0.02 < 0.05$ dan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar $0.01 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah.

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Uji t

Uji T untuk menguji secara parsial koefisien regresi signifikan atau tidak. Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 0,05$ atau 5% dengan kriteria jika nilai t hitung $> t$ tabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, jika sebaliknya maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6 Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.744	6.807		4.369	.455
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	.242	.122	.236	1.984	.002
	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	.183	.195	.111	2.836	.001

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui nilai t hitung sebesar variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) sebesar 1.984 dan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) sebesar 2.836 lebih besar dari t tabel yaitu 1.667, dengan nilai signifikan sebesar $0.002 < 0.05$ untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan dan $0.01 < 0.05$ untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan. Sehingga variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah.

2. Uji F

Uji F untuk menguji secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikan sebesar 0.05.

Tabel 4.7 Uji F

NOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.233	2	17.616	4.495	.000 ^b
	Residual	466.014	66	7.061		
	Total	501.246	68			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

b. Predictors: (Constant), AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan tabel di atas, jika pengambilan keputusan berdasarkan nilai F_{tabel} yaitu 3.130 sedangkan nilai f hitung sebesar 4.495 dengan signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($0,00 < 0,05$). Sehingga variabel Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara

simultan berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Saat nilai koefisien mendekati satu, berarti kemampuan variabel - variabel independen menunjukkan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.865 ^a	.735	.742	2.657	1.523

a. Predictors: (Constant), AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh Adj. R² dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,742. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah sebesar 74,2% sedangkan sisanya sebesar 25,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

4.8 Pembahasan

Berikut ini pembahasan mengenai hasil uji penelitan yang telah dilakukan :

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntablitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi sebesar 0,242 dan memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, artinya apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Hipotesis kedua penelitian ini adalah untuk menguji apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pada kantor BPKAD Palopo. Hal ini terlihat dari uji hipotesis, koefisien

regresi sebesar 0,183 dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah.

3. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel independen Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah (Y). Nilai F_{tabel} yaitu 3.130 sedangkan nilai f hitung sebesar 4.495 dengan signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga variabel bebas penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dengan membagikan kuisioner kepada Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Honorer Kantor BPKAD Kota Palopo. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh baik secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal tersebut bisa dilihat dari Uji T dan Uji F.

5.2 Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, tentu peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalamnya. Bagi akademik penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini. Maka peneliti menyarankan bagi BPKAD Kota Palopo untuk lebih meningkatkan pengendalian dan juga pengawasan terhadap tugas dan fungsi kerja sehingga memperikan dampak terhadap tata kelola organisasi yang semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, D. (2018). APBD Molor Hambat Pembangunan Daerah. <https://ekbis.sindonews.com/read/1274999/33/apbd-molor-hambat-pembangunan-daerah-1516342927>. Diakses (15-Desember-2019: 20:27 WITA).
- Angraeni, R. (2019). BI akan Rapikan Uang APBD yang Mengendap di Bank. <https://ekbis.sindonews.com/read/1456705/33/bi-akan-rapikan-uang-apbd-yang-mengendap-di-bank-1573142442>. Diakses (15-Desember-2019: 20:32 WITA).
- Aprianti, D., Nursiam. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Boyolali). *Jurnal, FEB UMS*.
- Batian, I. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Fajriah, R. L. (2017). Sri Mulyani Beberkan Rapor Merah Pengelolaan APBD <https://ekbis.sindonews.com/read/1263411/33/sri-mulyani-beberkan-rapor-merah-pengelolaan-apbd-2017-1512549558>. Diakses (15-Desember-2019: 20:25 WITA).
- Fauziyah, M. R. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(6), 1-16.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (edisi kelima). Semarang: Universitas Semarang.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparasi Dan Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting and Maangement (CBAM)*. 2(1), 82-90.
- Irawan, I. K. (2019). Salah Kaprah Pengelolaan Keuangan Daerah <https://kompas.id/baca/utama/2019/11/18/salah-kaprah-pengelolaan-keuangan-daerah/>. Diakses (15-Desember-2019: 20:38 WITA).
- Kerlinger. (2006). *Asas–Asas Penelitian Behaviour*. Edisi 3, Cetakan 7. *Gadiah Mada University Press*. Yogyakarta.

- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2018). *eProceedings of Management*. 6(1), 705-714.
- Lewier, C. N., & Kurniawan, C. H. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *Jurnal Program Studi Akuntansi*. 1–14.
- Mardiasmo, (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1).
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nurlaili. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Skpd Kabupaten Bengkalis) (Doctoral dissertation, Riau University). 3(1), 449-461.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pongoliu, F. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Studi Pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango. *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo.

- Putri, F. E. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Skpd Provinsi Riau) (Doctoral dissertation, Riau University). 4(1), 483-497.
- Rakhmatulloh. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah Masih Buruk. <https://nasional.sindonews.com/read/1193829/13/pengelolaan-keuangan-daerah-masih-buruk-1491207069>. Diakses (15-Desember-2019: 20:45 WITA).
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Saragih, C. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun). *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. 2(2), 1-16.
- Sastra, Y. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Medan.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta.
- Sumiyati. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan keuangan daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). 2(2), 1-15.
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahida, N. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Wahyuni, P. S., Sulindawati, N. L. G. E., Herawati, N. T. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*. 2(1).